

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta*. Bandung: Alumni, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas, Marwan, dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Simanjuntak, Ricardo. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kontan Publishing, 2023.
- Situmorang, Victor M., dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- _____. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Artikel/Jurnal

- Arjaya, I Made, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi. "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus PKPU PT.Rendamas Realty Dan Jane Christina Tjandra, Putusan No.4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)." *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (2018): 46-55. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.46-55>.
- Asril, Ferry. "Efektifitas Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002." *Menara Ilmu* 11, no. 76 (Juli 2017): 68. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/302>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11-21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Cita, H.R., Lili Rasjidi Abubakar, dan Etty Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditor Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2018): 205–220. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/105>.
- Dirgantara, Febrian, dkk. "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia." *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 152. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1444>.
- Faizah, Nadjematul, dan Difla Azzahra. "Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022): 128. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/761>.
- Iriawan, Asep Iwan. "Kepastian Hukum Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Action Research Literate* 7, no. 10 (Oktober 2023): 104. <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/193>.
- Iskandar, Agus. "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Pranata Hukum* 7, no. 1 (Januari 2012): 77. <https://www.neliti.com/publications/26749/kewenangan-pengadilan-niaga-dalam-penyelesaian-sengketa-bisnis>.
- Jaya, Darell Tri, dan Ida Kurnia. "Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 4. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/660>.

- Khairunnisa, Shania, and Arman Nefi. "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi Dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL Dan PT Berlian Tangker)." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (2023): 163-164. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.220>.
- Leonard, Tommy, and Yolanda C. Irianda Panjaitan. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023): 499. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>.
- Maulana, Muhammad Irfan. "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST)." *Media Hukum Indonesia* 2 (2025). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15556153>.
- Nasution, M.L., Sunarmi, dan R. Robert. "Analisis Yuridis PKPU dalam Perspektif Keadilan Kreditor." *Recht Studiosum Law Review* 5, no. 1 (2023): 52. <https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/12105>.
- Rahmadiana, Afitrah, Marjo, dan Lapon Tukan Leonard. "Prosedur Pemeriksaan dan Pertimbangan Hakim pada Permohonan Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 3 (2023): 11. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.38838>.
- Rifani, R.A., dan F. Fauziah. "Efektivitas Pelaksanaan PKPU dalam Mencegah Kepailitan." *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 125. <https://dev-ojs.journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/57>.
- Sihombing, Putri Aprilianti, dan Heru Pringgodani Sanusi. "Akibat Hukum terhadap Penolakan Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Amicus Curiae* 2, no. 1 (Januari–Maret 2025): 393. <https://doi.org/10.25105/6w88gf95>.
- Siregar, Horman. "Perdamaian Yang Tercapai Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn.Niaga.Sby)." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.805>.
- Sofia, Arijna Nurin. "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1415. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>.
- Sya'ban, Mohamad Rizki. "Optimalisasi Rekonsiliasi dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitur." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 6 (2024): 518. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i6.398>.

Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 330. <https://doi.org/10.22146/jmh.16230>.

Wiraguna, S. A. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Staatsblad 1847 Nomor 23).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 190/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Media Online dan Internet

Budiono, Doni. "Kajian Yuridis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan PKPU Dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021." PDB Law Firm, 6 Maret 2026. <https://pdb-lawfirm.id/kajian-yuridis-pengajuan-kasasi-terhadap-putusan-pkpu-dalam-putusan-mk-nomor-23-puu-xix-2021/>.

Hukumonline. “Memprediksi Tren Permohonan PKPU di Tahun 2024.” Diakses 10 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memprediksi-tren-permohonan-pkpu-di-tahun-2024-lt65813b35d0b50/>.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). “Homologasi.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 14 April 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/homologasi>.

_____. “Niaga.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 19 April 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Niaga>.

_____. “Pengadilan.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 19 April 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pengadilan>.

_____. “Perdamaian.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 14 April 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/perdamaian>.